KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Rencana Gedung Baru DPR Bermotif Proyek
Tanggal : Senin, 30 Maret 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Rencana Gedung Baru DPR Bermotif Proyek

Alasan DPR periode kini berencana membangun gedung baru sama dengan alasan DPR periode sebelumnya. Yaitu, keterbatasan kemampuan gedung yang ada menampung orang. Tapi anehnya, DPR menambah jumlah staf.

MENURUT Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), alasan itu menunjukkan niat DPR membangun gedung baru bukan untuk bekerja optimal menjalankan fungsinya, atau untuk mewujudkan visi menjadikan DPR modern.

"Jadi semata-mata mempertimbangkan garapan proyek baru. Kan anggaran DPR naik terus, jadi rencana membangun gedung kental orientasi proyek," kata Koordinator Formappi Lucius Karus.

Dia menganggap aneh DPR menggunakan alasan keterbatasan kapasitas gedung. Sementara DPR juga menginginkan penambahan staf ahli dalam APBN Perubahan 2015, ada penambahan empat sampai lima staf ahli per anggota dewan. "Kalau benar ada keterbatasan kapasitas gedung parlemen, semestinya DPR tidak menambah staf," terangnya.

Dengan demikian, menurut Lucius, alasan pembangunan gedung baru tidak sinkron dengan penambahan jumlah staf. Ada tumpang tindih rencana. Karena itu masuk akal jika rakyat sulit percaya dengan alasan pembangunan gedung baru.

Apalagi, tambah Lucius, rencana pembangunan gedung baru DPR disampaikan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono pada hari-hari awal kerja DPR periode 2014-2019.

> **Jadi semata-mata mempertimbangkan garapan proyek baru. Kan anggaran DPR naik terus, jadi rencana membangun gedung kental orientasi proyek.**
>
> **Lucius Karus**
> Koordinator Formappi

Sementara, publik mengetahui dalam enam bulan ini DPR belum juga menghasilkan apa-apa untuk kepentingan rakyat. "DPR semestinya terlebih dahulu meyakinkan rakyat dengan kinerja yang baik, kerja dulu baru minta macam-macam," imbuhnya.

Lucius menambahkan, sah saja jika DPR hendak membangun gedung baru, asalkan bisa membuktikan kepada publik dengan menghasilkan suatu bukti kerja nyatanya kepada rakyat. Pada dasarnya yang diprotes oleh publik bukan tidak perlunya gedung baru, tapi lebih kepada urgensi.

"Semestinya DPR lebih mementingkan tugas-tugas kedewanan, ketimbang menjadikan pembangunan gedung baru sebagai agenda mendesak. Kalau seperti ini, jangan heran jika rakyat curiga rencana pembangunan gedung baru bermotif proyek," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono di Pers Gathering, Bogor, kemarin, menyampaikan lagi rencana DPR periode 2014-2019 membangun gedung baru.

"Kami mau membesarkan parlemen, kami membutuhkan sarana dan prasarana. Bukan hanya gedung. Sumber daya manusia juga perlu kami perbaiki untuk menghadapi globalisasi," kata Roem.

Menurut politikus Partai Golkar itu, pembangunan gedung DPR perlu diwujudkan agar DPR lebih modern. Apalagi tuntutan kinerja anggota dewan punya tugas berat mewakili rakyat secara langsung.

"Karena anggota DPR tidak sama seperti BPK atau Mahkamah Agung. Dewan punya proteksi dan ruang-ruangan besar. Kita bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung. Itu bedanya kita dengan lembaga lain. Karena itu kita membutuhkan sarana dan prasaran penunjang," jelasnya.

Karena itulah, Roem, diperlukan satu sistem yang betul-betul dapat merangkum semua persoalan yang dihadapi oleh DPR dan rakyat.

"DPR perlu sarana dan prasaranan memadai agar bisa bekerja optimal," ujarnya. ■ ONI/JPNN